

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan pada dasarnya merupakan proses yang meliputi perubahan struktur sosial, perubahan dalam sikap hidup masyarakat dan perubahan dalam kelembagaan (institusi) nasional. Pembangunan juga meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan dan pemberantasan kemiskinan. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan, maka pembangunan suatu negara dapat diarahkan pada tiga hal pokok yaitu: meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat, meningkatkan standar hidup masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses baik kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial dalam kehidupannya (Todaro, 2004).

Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita (Suparmoko dalam Afrizal, 2013). Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kehidupan yang layak. Peran pemerintah sebagai mobilisator pembangunan sangat strategis dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan.

Salah satu peran perencanaan adalah sebagai arahan bagi proses pembangunan untuk berjalan menuju tujuan yang ingin dicapai disamping sebagai tolok ukur keberhasilan proses pembangunan yang dilakukan sedangkan pembangunan sendiri dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di tingkat nasional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat daerah.

Pertumbuhan suatu negara dipengaruhi oleh akumulasi modal (investasi pada tanah, peralatan, sarana dan prasarana), sumberdaya alam, sumberdaya manusia baik jumlah maupun tingkat kualitas penduduknya, kemajuan teknologi, akses terhadap informasi, keinginan untuk malakukan inovasi dan pengembangan diri serta budaya kerja (Todaro, 2004).

Jadi tujuan pembangunan ekonomi disamping untuk meningkatkan pendapatan nasional riil juga untuk meningkatkan produktivitas. Pembangunan ekonomi dapat memberikan kepada manusia kemampuan yang lebih besar untuk mengolah alam sekitarnya dan mempertinggi tingkat kebebasannya dalam mengadakan suatu tindakan tertentu. Pembangunan ekonomi ini mempunyai tiga sifat penting, sifat yang pertama adalah suatu proses yang berarti merupakan perubahan yang terjadi terus-menerus. Kedua, suatu usaha untuk menaikkan pendapatan per jiwa/*income per kapita*. Ketiga, adalah kenaikan *income perkapita* itu harus terus-menerus dan pembangunan itu dilakukan sepanjang masa (Hasibuan dalam Afrizal, 2013).

Perkembangan ekonomi dipandang sebagai suatu proses di mana pendapatan nasional riil per kapita naik dibarengi dengan penurunan kesenjangan pendapatan dan pemenuhan keinginan masyarakat secara keseluruhan. Dalam ungkapan Okun dan Richardson, "Perkembangan ekonomi adalah perbaikan terhadap kesejahteraan material yang terus-menerus dalam jangka panjang yang dilihat dari lancarnya distribusi barang dan jasa.(Jhingan, 2000).

Salah satu indikator ekonomi yang mendukung perencanaan pembangunan adalah statistik pendapatan regional yang lebih dikenal dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Di samping itu, data ini juga digunakan untuk mengevaluasi upaya dan hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. pertumbuhan ekonomi Lampung dapat ditunjukkan dengan kenaikan PDRB per kapita atas dasar harga konstan dari tahun ke tahun.

**Tabel 1. PDRB per Provinsi Pulau Sumatera tahun 2008-2012 (Milyar Rupiah)**

No	Provinsi	2008	2009	2010	2011	2012
1	Aceh	34097.99	32219.09	33103.08	34704.82	36487.88
2	Sumatera Utara	106172.36	111559.22	118718.90	126587.62	134461.51
3	Sumatera Barat	35176.63	36683.24	38862.14	41293.35	43925.82
4	Riau	91085.38	93786.24	97735.60	102665.96	106298.73
5	Jambi	15297.77	16274.91	17471.69	18963.52	20373.53
6	Sumatera Selatan	58065.46	60452.94	63859.14	68008.50	72095.88
7	Bengkulu	7441.87	7859.92	8339.75	8878.82	9464.83
<b>8</b>	<b>Lampung</b>	34443.15	36256.30	38389.90	40858.94	43526.87
9	Kepulauan Ba-Bel	9899.93	10270.11	10884.95	11592.89	12257.11
10	Kepulauan Riau	37014.74	38318.83	41075.86	43809.83	46796.68
	<b>Rata-rata 33 Prov.</b>	60577.16	63465.39	67363.23	71641.17	76143.13

*Sumber: Badan Pusat Statistik 2013, PDRB Per Provinsi.*

Tabel 1 di atas menjelaskan mengenai perkembangan PDRB di provinsi yang ada di Pulau Sumatera selama kurun waktu lima tahun terakhir dan rata-rata PDRB 33 Provinsi yang ada di Indonesia serta perbandingan laju peningkatan PDRB antar Provinsi. Provinsi Sumatera Utara menjadi Provinsi yang memiliki tingkat PDRB tertinggi selama kurun waktu lima tahun terakhir di Pulau Sumatera dengan laju pertumbuhan yang selalu meningkat stabil setiap tahunnya sedangkan Kepulauan Bangka Belitung menjadi Provinsi dengan tingkat perkembangan PDRB terendah di Pulau Sumatera selama kurun waktu lima tahun terakhir. Dari data yang disajikan tampak adanya ketimpangan yang cukup timpang antara perkembangan PDRB di Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pada Tabel 1 di atas terlihat PDRB Provinsi Lampung selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya tetapi tidak pernah melebihi PDRB rata-rata 33 provinsi di Indonesia. Tahun 2008 PDRB Provinsi Lampung sebesar 34443.15 dan rata-rata PDRB nasional sebesar 60557.16. Tahun 2009 PDRB Provinsi Lampung sebesar 36256.30 dan rata-rata PDRB nasional sebesar 63456.39. Tahun 2010 PDRB Provinsi Lampung sebesar 38389.90 dan rata-rata PDRB nasional sebesar 67363.23. Tahun 2011 PDRB Provinsi Lampung meningkat sebesar 40858.94 dan rata-rata PDRB nasional sebesar 71641.17. Tahun 2012 tingkat PDRB Provinsi Lampung sebesar 43526.87 dan menjadi PDRB tertinggi selama kurun waktu lima tahun terakhir dan rata-rata PDRB nasional sebesar 76143.13

Dilihat dari fakta tersebut, PDRB Provinsi Lampung tidak pernah menduduki peringkat tiga besar dari sepuluh provinsi yang ada di Pulau Sumatera. PDRB Provinsi Lampung tertinggi hanya mampu menduduki peringkat kelima yang terjadi pada tahun 2010. Selebihnya PDRB Provinsi Lampung selalu menduduki peringkat di atas peringkat lima. Fakta ini menunjukkan bahwa PDRB Provinsi Lampung belum mampu mengungguli PDRB provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Dengan demikian, diperlukan usaha yang lebih baik lagi bagi pemerintah Provinsi Lampung untuk dapat meningkatkan PDRB Provinsi Lampung.

**Tabel 2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Provinsi Lampung Tahun 2008-2012**

Tahun	PDRB (Juta Rp)	Laju Pertumbuhan (Persen)
2008	34 443 152	-
2009	36 256 295	5,26
2010	38 389 899	5,88
2011	40 858 942	6,43
2012	43 505 816	6,48
<b>Rata-rata</b>	<b>38 690 821</b>	<b>6,01</b>

*Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2013*

Laju pertumbuhan PDRB di Provinsi Lampung menurut harga konstan tahun 2000 selama lima tahun terakhir relatif mengalami kenaikan dan cukup stabil dengan nilai rata-rata sebesar 38 690 821 dan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 6,01%.

Tahun 2008 pertumbuhan PDRB sebesar 6,08%. Tahun 2009 pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung mengalami penurunan sebesar 5,26% sedangkan pada tahun 2010 terjadi peningkatan sebesar 5,88%. Kenaikan laju terbesar pertumbuhan PDRB

terjadi pada tahun 2011 dan 2012 yakni pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung 6,43% dan 6,48% serta rata-rata laju pertumbuhan PDRB sebesar 5,88%.

Secara umum, laju pertumbuhan PDRB di Provinsi Lampung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ini dikarenakan terjadinya peningkatan pendapatan nasional yang cukup tajam di setiap tahunnya dapat membantu membuat rencana pelaksanaan program pembangunan yang berjangka, membantu merumuskan kebijakan pemerintah dan membandingkan keadaan perekonomian dari waktu ke waktu antar daerah.

**Tabel 3 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha Provinsi Lampung Tahun 2008-2012 ( Miliar Rp)**

No	Sektor	2008	2009	2010	2011	2012
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perikanan	284 619.1	295 883.8	304 777.1	315 036.8	328 279.7
2	Pertambangan dan Penggalian	172 496.3	180 200.5	187 152.5	190 143.2	193 139.2
3	Industri Pengolahan	557 764.4	570 102.5	597 134.9	633 781.9	670 190.6
4	Listrik, Gas dan Air bersih	14 994.4	17 136.8	18 050.2	18 899.7	20 094.0
5	Bangunan	131 009.6	140 267.8	150 022.4	159 122.9	170 884.8
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	363 818.2	368 463.0	400 474.9	437 472.9	473 152.6
7	Pengangkutan dan Komunikasi	165 905.5	192 198.8	217 980.4	241 303.0	265 383.7
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	198 799.6	209 163.0	221 024.2	236 146.6	253 000.4
9	Jasa-jasa	193 049.0	205 434.2	217 842.2	232 659.1	244 807.0
<b>Total PDRB</b>		<b>2 082 456.1</b>	<b>2 178 850.4</b>	<b>2 314 458.8</b>	<b>2 464 566.1</b>	<b>2 618 932.0</b>

*Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2013.*

Tabel 3 di atas menjelaskan mengenai PDRB atas dsar harga konstan tahun 2000 menurut lapangan usaha. Selama kurun waktu lima tahun Industri pengolahan menjadi sektor yang tertinggi diantara sektor-sektor lainnya. Lalu sektor

perdagangan, hotel, dan restoran menjadi sektor kedua yang memberikan kontribusi terhadap PDRB menurut lapangan usaha, sedangkan sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan sektor ketiga tertinggi di antara sektor lainnya dengan laju pertumbuhan yang cukup stabil setiap tahunnya.

Pembangunan di Provinsi Lampung yang berlangsung secara menyeluruh dan berkesinambungan telah meningkatkan perekonomian masyarakat. Pencapaian hasil-hasil pembangunan yang sangat dirasakan masyarakat merupakan agregat pembangunan dari Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang tidak terlepas dari usaha keras bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat namun di sisi lain berbagai kendala dalam memaksimalkan potensi sumber daya manusia dan sumber modal masih dihadapi oleh penentu kebijakan di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota.

PDRB berpengaruh pada perekonomian dengan cara mendistribusi pendapatan bruto dan kekayaan serta menambah tingkat output. PDRB yang selalu meningkat maka akan meningkatkan pembangunan di daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan di daerah akan meningkat jika PDRB selalu meningkat tiap tahunnya.

Bukan hanya itu, kegiatan ekonomi juga akan meningkat dan pendapatan nasional mengalami kemajuan serta bisa mengurangi pengangguran dan kemiskinan yang selalu menjadi masalah di tiap-tiap wilayah/negaranya.

Ketertinggalan suatu daerah dalam membangun dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya adalah rendahnya daya tarik suatu daerah menyebabkan tingkat aktivitas ekonomi yang rendah. Suatu daerah yang tidak memiliki sumber daya (baik manusia maupun alam) serta kurangnya intensif yang ditawarkan (prasarana infrastruktur, perangkat keras dan lunak, keamanan dan sebagainya) dapat menyebabkan suatu daerah tertinggal dalam pembangunan. Untuk mengejar ketinggalan dari daerah lainnya, terdapat beberapa alternatif pengembangan suatu daerah. Alternatif tersebut dapat berupa investasi pembangunan kualitas sumber daya manusia.

Menurut Schultz, ada lima cara pembangunan sumber daya manusia antara lain : 1). Fasilitas dan pelayanan kesehatan, pada umumnya mempengaruhi harapan hidup kekuatan dan stamina rakyat, tenaga dan vitalitas rakyat. 2). Latihan jabatan, termasuk magang yang diorganisasikan oleh perusahaan. 3). Pendidikan yang diorganisasikan pada tingkat dasar, menengah dan tinggi. 4). Program studi bagi orang dewasa yang tidak diorganisasikan oleh perusahaan, termasuk program ekonomi khususnya pada pertanian. 5). Migrasi perorangan dan keluarga untuk menyesuaikan diri dengan kesempatan kerja yang selalu berubah (Jhingan, 2012:414).

Dalam modal pembangunan manusia terdapat keterkaitan antar pembangunan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan ekonomi merupakan prasyarat bagi tercapainya pembangunan manusia, karena dengan pembangunan ekonomi akan menjamin meningkatnya produktivitas dan pendapatan



melalui penciptaan kesempatan kerja. Hubungan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia juga bersifat timbal balik. Pembangunan manusia juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, karena tanpa pembangunan manusia yang berkelanjutan tidak akan dapat dicapai pembangunan ekonomi yang cukup memadai.

Penduduk Indonesia yang berjumlah besar dapat menjadi investasi pembangunan bila memiliki kualitas yang memadai. Hal ini mengacu pada konsep bahwa manusia merupakan pelaku, pelaksana dan penikmat pembangunan. Artinya dengan kualitas penduduk yang rendah, maka manusia akan lebih banyak berperan sebagai penikmat dan kurang berperan sebagai pelaku dan pelaksana pembangunan.

Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat kepada perkembangan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja dan pertambahan tersebut memungkinkan negara itu menambah produksi. Di samping itu, sebagai akibat pendidikan, latihan, dan pengalaman kerja, kemahiran penduduk akan selalu bertambah tinggi. Maka produktivitasnya akan bertambah dan ini selanjutnya menimbulkan pertambahan produksi yang lebih cepat daripada pertambahan tenaga kerja.

Dorongan lain yang timbul dari perkembangan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi bersumber dari akibat pertambahan itu kepada luas pasar. Besarnya luas pasar dari barang-barang yang dihasilkan dalam suatu ekonomi tergantung kepada pendapatan penduduk dan jumlah penduduk. Maka apabila penduduk bertambah

dengan sendirinya luas pasar akan bertambah pula. Karena peranannya ini maka perkembangan penduduk akan menimbulkan dorongan kepada pertambahan dalam produksi dan tingkat kegiatan ekonomi.

Ada beberapa pendekatan untuk mengembangkan sumber daya manusia. Satu diantaranya adalah pendekatan mutu modal manusia (*human capital*). Penggunaan istilah modal manusia juga menyiratkan suatu perhatian pada pengolahan sumber daya manusia, yang merupakan suatu investasi. Modal manusia dalam terminologi ekonomi sering digunakan untuk untuk bidang pendidikan, kesehatan dan berbagai kapasitas manusia lainnya yang ketika bertambah dapat meningkatkan produktivitas.

Pendidikan memainkan peran kunci dalam hal kemampuan suatu perekonomian untuk mengadopsi teknologi modern dan dalam membangun kapasitasnya bagi pembangunan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Dalam pendekatan modal manusia, manusia menempati peranan yang amat penting selain modal (uang), sumber alam, dan teknologi dalam proses produksi. Untuk mengembangkan sumber daya manusia, perlu juga diingat bahwa ada beberapa hambatan yang tentu akan dihadapi.

Secara garis besar hambatan itu ada dua, hambatan dari dalam dan hambatan dari luar. Akan tetapi menurut perhitungan Bank Dunia, untuk negara berkembang seperti Indonesia, hambatan dari dalam lebih besar pengaruhnya. Ini berarti tingkat pendidikan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya

manusia harus terus dikejar, serta menciptakan kesempatan kerja yang mencakup pemanfaatan sumber daya manusia secara maksimal dengan sumber daya manusia yang memiliki tingkat produktivitas tinggi.

**Tabel 4. Perkembangan Indeks Pendidikan Provinsi Lampung**

<b>Tahun</b>	<b>Angka Melek Huruf</b>	<b>Rata-rata lama sekolah</b>	<b>Indeks pendidikan</b>
2008	93,63	7,30	78,64
2009	94,37	7,49	79,56
2010	94,64	7,75	80,32
2011	95,02	7,82	80,72
2012	95,13	7,87	80,91
<b>Rata-rata</b>	<b>94,55</b>	<b>7,64</b>	<b>80,03</b>

*Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2013(Data diolah)*

Berdasarkan Tabel 3 di atas, indeks pendidikan Provinsi Lampung yang diukur melalui angka melek huruf dan rata-rata lama selama lima tahun terakhir perkembangannya cukup baik. Mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2008 angka melek huruf sebesar 93,63% dan rata-rata lama sekolah sebesar 7,3% serta indeks pendidikan kembali meningkat senilai 78,64%. Tahun 2009 angka melek huruf sebesar 94,37% dan rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan yang cukup baik yakni sebesar 7,49% serta indeks pendidikan senilai 79,56%. Tahun 2010 angka melek huruf meningkat menjadi 94,64% dan rata-rata lama sekolah meningkat cukup tajam yakni sebesar 7,75% serta indeks pendidikan senilai 80,32.

Tahun 2011 angka melek huruf sebesar 95,02% dan rata-rata lama sekolah sebesar 7,82% serta indeks pendidikan senilai 80,72%. Tahun 2012 angka melek huruf dan

rata-rata lama sekolah Provinsi Lampung menjadi angka tertinggi selama lima tahun terakhir yakni masing-masing sebesar 95,13% dan 7,87% serta indeks pendidikan senilai 80,91%. Rata-rata pertumbuhan angka melek huruf sebesar 94,55%, rata-rata pertumbuhan lama sekolah sebesar 7,64% dan rata-rata indeks pendidikan sebesar 80,03%.

Dalam teori ekonomi makro, dari sisi pengeluaran, pendapatan regional bruto adalah penjumlahan dari berbagai variabel termasuk di dalamnya adalah investasi. Ada beberapa hal yang sebenarnya berpengaruh dalam soal investasi ini. Investasi sendiri dipengaruhi oleh investasi asing dan domestik. Pertumbuhan yang ditopang oleh investasi dianggap akan dapat meningkatkan produktivitas sehingga membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Mankiw (2000) dalam teori pertumbuhan model Solow bahwa pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian, serta pengaruhnya terhadap output barang dan jasa suatu negara secara keseluruhan, apabila tingkat pertumbuhan perekonomian mencapai kondisi mapan, kemajuan teknologi perlu dimasukkan ke dalam model, yang meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memproduksi sepanjang waktu. Investasi yang terjadi di suatu negara terdiri dari investasi pemerintah dan investasi swasta. Investasi pemerintah dapat dijalankan melalui salah satu instrumen kebijakan, yaitu pengeluaran pemerintah untuk investasi sedangkan investasi dari sektor swasta dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri (asing).

Kebijakan pemerintah yang berorientasi terhadap pertumbuhan pembangunan diharapkan akan memberikan dampak terhadap perubahan ekonomi menjadi lebih baik diberbagai sektor, karena pertumbuhan ekonomi akan mencerminkan adanya peningkatan dari perekonomian yang buruk kedalam perekonomian yang lebih baik dengan adanya peningkatan pendapatan perkapita maupun pendapatan dari sektor PDRB.

Investasi pemerintah lebih menekankan pada usaha pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan dana yang berasal dari APBD. Investasi pemerintah dilakukan guna menyediakan barang publik. Besarnya investasi pemerintah dapat dihitung dari selisih antara total anggaran pemerintah dengan belanja modal (Rustiono dalam Nora, 2013). Melalui pengeluaran pemerintah dalam APBD tiap tahunnya yang diarahkan ke berbagai sektor pembangunan, program dan proyek sesuai dengan prioritas yang ditetapkan, diharapkan mampu menstimulan perkembangan kesempatan kerja.

Pertumbuhan PDRB sebagai tolok ukur pertumbuhan suatu ekonomi regional juga tidak bisa lepas dari peran pengeluaran pemerintah di sektor layanan publik.

Pengeluaran pemerintah daerah diukur dari total belanja rutin dan belanja pembangunan yang dialokasikan dalam anggaran daerah. Semakin besar pengeluaran pemerintah daerah yang produktif maka semakin memperbesar tingkat perekonomian suatu daerah (Wibisono dalam Deddy, 2009).

Pengeluaran konsumsi pemerintah yang terlalu kecil akan merugikan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah yang proporsional akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran konsumsi pemerintah yang boros akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Pada umumnya pengeluaran pemerintah membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah pada penelitian ini di *proxy* menggunakan belanja modal pemerintah daerah dalam APBD. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Berkaitan dengan uraian di atas, dapat dilihat perkembangan realisasi pengeluaran pemerintah yaitu belanja modal di Provinsi Lampung pada Tabel 4.

**Tabel 5. Belanja Modal Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2008-2012**

Tahun	Belanja Modal Daerah (Rupiah)	Pertumbuhan Belanja Modal (%)
2008	208.831.677.000	-
2009	233.290.049.000	11,71
2010	425.809.200.000	82,52
2011	631.250.022.000	48,25
2012	1.351.266.016.000	114,06
<b>Rata-rata</b>	<b>570.089.393.000</b>	<b>64.13</b>

*Sumber: Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung, 2013*

Menurut Tabel 4 di atas, nilai dari belanja modal daerah Provinsi Lampung meningkat dengan tingkat pertumbuhan yang berfluktuasi selama lima tahun terakhir. Rata-rata belanja modal daerah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung sebesar 570.089.393.000 dan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 64,13%. Tahun 2008 belanja modal daerah sebesar 208.831.677.000. Tahun 2009 belanja modal meningkat menjadi 233.290.049.000 dan tingkat pertumbuhan belanja modal meningkat sebesar 11,71%. Tahun 2010 belanja modal sebesar 425.809.200.000 dan terjadi peningkatan pertumbuhan belanja modal yang cukup tinggi sebesar 82,52% dari tahun sebelumnya. Tahun 2011 belanja modal sebesar 631.250.022.000 dan pertumbuhan meningkat sebesar 48,25%. Tahun 2012 belanja modal pemerintah menjadi belanja modal tertinggi selama lima tahun terakhir yakni sebesar 1.351.266.016.000 dan pertumbuhan belanja modal meningkat tajam sebesar 114,06%.

Jika investasi naik maka modal daerah tersebut akan mengalami kenaikan pula. Sehingga akan memperluas usaha serta memperluas tingkat kesempatan kerja. Investasi pemerintah dan swasta jika mengalami kenaikan maka akan meningkatkan produksi sehingga faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, kapital, modal, serta sumber daya alam, sumber daya manusia juga akan mengalami kenaikan. Salah satunya adalah angkatan kerja sebagai bukti keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang telah ada.

Tenaga kerja merupakan suatu faktor yang mempengaruhi output suatu daerah. Angkatan kerja yang besar akan terbentuk dari jumlah penduduk yang besar. Namun pertumbuhan penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang buruk terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Todaro (2000) pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin jauh. Selanjutnya dikatakan bahwa masalah kependudukan yang timbul bukan karena banyaknya jumlah anggota keluarga, melainkan karena mereka terkonsentrasi pada daerah perkotaan saja sebagai akibat dari cepatnya laju migrasi dari desa ke kota. Namun demikian jumlah penduduk yang cukup dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan memiliki skill akan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Dari jumlah penduduk usia produktif yang besar maka akan mampu meningkatkan jumlah angkatan kerja yang tersedia dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan produksi output di suatu daerah.

Jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia. Semakin bertambah besar lapangan kerja yang tersedia maka akan menyebabkan semakin meningkatkan total produksi di suatu daerah. Dalam hal untuk meningkatkan pendapatan dibutuhkan peran serta sektor swasta dan peningkatan partisipasi tenaga kerja lokal sebagai modal untuk membangun daerah ini sebagai pedoman perencanaan guna meningkatkan pembangunan di Provinsi Lampung.



**Tabel 6. Angkatan kerja Provinsi Lampung tahun 2001-2012**

Tahun	Jumlah Penduduk (Dalam Jiwa)	Angkatan Kerja (Dalam Jiwa)	TPAK (%)
2008	7.437.414	3.352.247	-
2009	7.526.448	3.387.175	67,77
2010	7.608.405	3.737.078	67,95
2011	7.691.007	3.482.301	68,01
2012	7.767.312	3.449.307	66,27
<b>Rata-rata</b>	<b>7.606.117</b>	<b>3.481.621</b>	<b>67,50</b>

Sumber: Lampung Dalam Angka, 2013.

Pada Tabel 5 di atas, angkatan kerja Provinsi Lampung serta Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami fluktuasi yang stabil sedangkan kondisi jumlah penduduk Lampung selama kurun waktu lima tahun selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Rata-rata jumlah penduduk sebesar 7.606.117, rata-rata angkatan kerja sebesar 3.481.621 dan rata-rata TPAK sebesar 67.50. Angkatan kerja tertinggi yakni di tahun 2010 sebanyak 3.737.078 dan terendah di tahun 2008 sebanyak 3.352.247 sedangkan TPAK tertinggi tahun 2011 yakni sebesar 68,01% dan terendah pada tahun 2012 sebesar 66,82%.

Peningkatan belanja barang dan jasa juga akan mendorong penyerapan tenaga kerja di masing-masing sektor. Sektor industri pengolahan merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Dari segi wilayah, dampak dari kenaikan belanja barang dan jasa tersebut akan bervariasi pada setiap kabupaten dan kota di Provinsi Lampung, tergantung dari sektor manakah kabupaten atau kota tersebut yang lebih ditingkatkan karena adanya kemampuan masing-masing daerah yang berbeda dengan daerah yang lain.

Kenaikan dan penurunan pertumbuhan di Provinsi Lampung selama 5 tahun dari tahun 2008-2012 dipengaruhi oleh banyak faktor. Kenaikan dan penurunan tersebut secara teori dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pengeluaran pemerintah, dan tenaga kerja. Jenjang pendidikan yang lebih tinggi pertumbuhannya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan tetapi tingkat penyerapannya tenaga kerja lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk tamatan SMA dan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jumlah angkatan kerja pencari kerja di Provinsi Lampung terus mengalami kenaikan sedangkan penyerapannya kecil. Pengeluaran pemerintah di Provinsi Lampung lebih bersifat konsumtif. Keadaan ini menyebabkan realisasi belanja daerah yang besar belum mendorong tingkat pertumbuhan di Provinsi Lampung secara signifikan.

Berdasarkan gambaran data tersebut peneliti mendapatkan bahwa Indeks Pendidikan Provinsi Lampung cukup tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 80,03%, proporsi pertumbuhan belanja modal daerah dengan nilai rata-rata sebesar 64.13% dan TPAK rata-rata sebesar 67,50% selama kurun waktu lima tahun terakhir tetapi pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung yang seharusnya juga terus meningkat tetapi setiap tahunnya justru berfluktuasi dengan rata-rata sebesar 6.01% dan berada pada urutan ke enam dari sepuluh provinsi yang ada di Pulau Sumatera sehingga dari uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “ Analisis indeks pendidikan, pengeluaran pemerintah, serta angkatan kerja terhadap PDRB di Provinsi Lampung periode 2001-2012 .

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, maka masalah pokok dalam penulisan ini adalah:  
Bagaimana pengaruh Indeks pendidikan, pengeluaran pemerintah, dan angkatan kerja secara bersama-sama terhadap PDRB di Provinsi Lampung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang dibuat, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu :

Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Indeks pendidikan, pengeluaran pemerintah, dan angkatan kerja secara bersama-sama terhadap PDRB di Provinsi Lampung.

## **D. Kerangka Pemikiran**

Pembangunan daerah dengan sistem otonomi daerah ditujukan demi terwujudnya pertumbuhan PDRB dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu kapasitas suatu perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa yang diukur melalui peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang memiliki wilayah yang cukup luas dan mempunyai sumber daya manusia serta alam yang cukup memadai serta jumlah penduduk yang tidak sedikit. Penduduk yang berjumlah banyak dapat menjadi modal bagi pembangunan apabila penduduk tersebut memiliki kualitas yang baik yang salah satunya dapat diukur melalui indeks pendidikan.

Peningkatan pendidikan dan skill para tenaga kerja juga memungkinkan terjadi efek limpahan kepada tenaga pekerja yang lain yaitu dengan berbagi pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan. Perbaikan dalam pendidikan, kemajuan dalam ilmu pengetahuan, perluasan spesialisasi dan perbaikan dalam organisasi produksi merupakan faktor yang penting yang akan memperbaiki mutu dan efisiensi faktor-faktor produksi dan akhirnya menciptakan pembangunan ekonomi. Dengan adanya sumber daya manusia dan alam yang memadai ditambah peran pemerintah khususnya dalam hal ini adalah investasi diharapkan dapat memaksimalkan dan memperluas kesempatan kerja di Provinsi Lampung serta sarana yang menunjang maka investasi pemerintah dan investasi swasta dapat menanamkan modal demi memperluas produksi yang akan meningkatkan pendapatan.

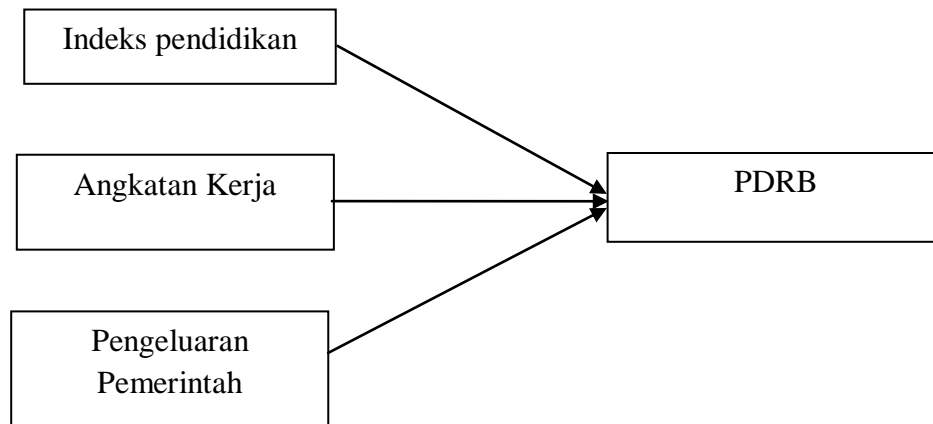
Dalam model pertumbuhan Sollow, pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditopang dari sisi modal berupa investasi saja tetapi tenaga kerja yang merupakan faktor produksi input yang nantinya akan mempengaruhi PDRB dengan kegiatan ekonomi yang dilakukannya. Penyerapan tenaga kerja dalam angkatan kerja merupakan hal yang mutlak dibutuhkan agar perekonomian terus berlanjut. Jika tidak maka akan terjadi pengangguran akan semakin meningkat. Akumulasi modal yang cukup oleh pemerintah dan swasta maka faktor input berupa tenaga kerja bisa diserap oleh sektor usaha yang ada di daerah tersebut yang pada akhirnya mendorong PDRB sedangkan investasi pemerintah yaitu merupakan pengeluaran rutin yang harus dikeluarkan oleh pemerintah sebagai belanja modal.

Tingkat pengeluaran pemerintah yang tinggi dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja dan meningkatkan jumlah investasi melalui angka pengganda (*Multiplier Effect*) permintaan agregat. Dengan demikian pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan output tergantung pada besarnya dan efektifitas angka pengganda pengeluaran. Peningkatan pengeluaran pemerintah akan menyebabkan semakin meningkatkan pendapatan daerah, karena peningkatan permintaan agregat akan mendorong kenaikan investasi dan pada akhirnya menyebabkan kenaikan produksi.

Permasalahan ketenagakerjaan merupakan masalah bagi suatu daerah yang jumlah pertumbuhan penduduknya tinggi tetapi diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja karena dengan persentase tingkat kesempatan kerja rendah maka semakin banyak penduduk yang menganggur namun sebaliknya bila tingkat persentase kesempatan kerja meningkat maka tingkat atau jumlah orang yang menganggur akan berkurang. Bila seperti itu maka perekonomian dalam suatu daerah dapat dikatakan baik.

Oleh karena itu, faktor-faktor produksi berupa modal, mutu modal manusia, dan angkatan kerja merupakan hal yang penting. Modal dalam bentuk pengeluaran pemerintah, mutu modal manusia dilihat dari tingkat pendidikannya, dan jumlah penduduk dalam bentuk angkatan kerja. Dari ketiga hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan kemampuan yang pada akhirnya juga akan meningkatkan produktivitas.

Adapun pemikiran penelitian dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:



**Gambar 1**  
**Kerangka Pemikiran**

### **E. Hipotesis**

Berdasarkan pada uraian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

Diduga bahwa indeks pendidikan, angkatan kerja dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Provinsi Lampung.